BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap kajian-kajian terdahulu sangat diperlukan guna menghindari penelitian dengan objek yang sama. Ditemukan beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh praktisi ataupun oleh mahasiswa mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini, yaitu:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/Tahun/Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Srikalimah., Nadhiroh, U., & Indriani,SR. 2019) "Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Koperasi Wanita Usaha Bersama Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri	Mengidentifikasi proses pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita "Usaha Bersama", apakah penyusunan sesuai dengan SAK ETAP, dan peneliti akan membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP.	Kuantitatif	Koperasi Wanita "Usaha Bersama" dalam penyusunan laporan keuangan hanya menyusun dua laporan keuangan, yaitu : Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca dan dalam penyajian sudah mengarah pada SAK ETAP, kenyataannya terdapat beberapa pos yang belum berdasarkan SAK ETAP.
2	(Widyastuti, 2017) "Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa	Meganalisis secara deskriptif implementasi pencatatan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP pada UMKM di bidang jasa sanggar belajar *Disciple Course* (Dis-co).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yang disebabkan kurangnya pengetahuan pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP.

3	(Raven & Sifrid, 2016) "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go"	Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SAK-ETAP pada penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatas Atas Laporan Keuangan dari Koperasi Karyawan – PT. Bank Sulut Go	Deskriptif-komparatif	Bank Sulut Go mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.
4	(Efva & Nilam, 2017) "Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi di kota Palembang"	Membandingkan dan mengevaluasi "Penyusunan Laporan Keuangan dengan standar akuntansi berlaku umum (SAK ETAP)" dengan "Penyusunan Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang diterapkan koperasi tersebut" Apakah penyajiannya sesuai atau tidak sesuai dengan SAK ETAP	Kualitatif	SAK-ETAP belum diterapkan secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan. Dari 33 koperasi yang menjadi objek penelitian hanya 3 koperasi yang membuat laporan keuangan secara utuh yaitu tediri dari neraca, laporan sisa hasil usaha, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuanngan. Sementara 30 koperasi yang lainnyan tidak membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan sisa hasil usaha telah dibuat oleh seluruh koperasi yang menjadi sampel penelitian ini, akan tetapi kualitas laporan dilihat dari tiap-tiap akun masih belum sesuai dengan standar.

5	(Anton, Rina, Rochmawati, Ermadiani, Harun, Burhanuddin, & Ubaidillah, 2017) "*Factors Affecting Understandibility Of Micro, Small, And Medium Enterprises In Preparation Of Financial Statement Based On* SAK ETAP *In* Palembang "	Menganalisis apakah diseminasi, sosialisasi, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, usia bisnis, dan ukuran bisnis telah mempengaruhi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di Kota Palembang.	Kuantitatif	Hanya usia bisnis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Sedangkan latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penyedia informasi, sosialisasi dan ukuran bisnis tidak mempengaruhi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP karena sebagian besar responden belum pernah menerima sosialisasi atau informasi tentang SAK ETAP. Ukuran bisnis juga tidak mempengaruhi pemahaman UMKM.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan acuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak koperasi dan UMKM yang membuat laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini disebabkan karena pengurus koperasi dan pemilik UMKM memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan usahanya sesuai SAK ETAP, tidak adanya tenaga profesional yang mengerti atau dapat mendampingi dan memberi arahan tentang pembuatan laporan keuangan dan kurang adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Dari penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian.

Sedangkan untuk persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan SAK ETAP pada suatu koperasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Koperasi

Menurut Pasal 1 Undang-undang No 25 tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan. Didirikannya koperasi dikarenakan adanya kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, terbentuknya koperasi didasari oleh adanya kepentingan kolektif

Menurut (Azhari, 2012) koperasi merupakan kumpulan individu/koperasi yang menjalankan usaha untuk kesejahteraan anggotanya. Dalam menjalankan usaha keanggotaannya, koperasi mempunyai dua fungsi *(double function)*, yaitu sebagai pemilik *(owner)* dan sebagai pengguna *(user).* Anggota sebagai pemilik berarti seorang anggota koperasi mempunyai hak yang sama dengan anggota koperasi lainnya, mempunyai hak suara, hak dipilih dan memilih, sebagai *owner* ditandai dengan adanya bukti penyetoran simpanan pokok dan simpanan wajib. Fungsi anggota sebagai *(user)* adalah anggota koperasi yang menggunakan dan memeanfaatkan kegiatan usaha. Pada koperasi simpan pinjam, setelah anggota menyetorkan simpanan wajib dan simpanan

pokok, berarti anggota berhak memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan ekonominya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan koperasi adalah badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian dengan asas kekeluargaan dan beranggotakan atas orang-orang dengan identitas ganda yang berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi sendiri dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

2.2.2 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jenis-jenis Koperasi di Indonesia terdiri atas koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa lain. Jenis-jenis koperasi tersebut dibentuk berdasarkan kesamaan kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi anggota. Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar.

1. Koperasi Produsen

   Koperasi produsen merupakan unit usaha bersama yang beranggotakan para pelaku usaha (UKM). Usaha yang dijalankan koperasi produsen berupa pengadaan bahan baku dan penolong bagi anggota. Selain itu koperasi juga menghasilkan barang dan jasa bagi anggota dan masyarakat.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Koperasi ini menjalankan usaha dibidang ekonomi secara bersama-sama. Koperasi konsumen bertujuan membantu, mendidik, dan melayani anggota untuk meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan koperasi konsumen akan menguntungkan anggota dan masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari secara mudah.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam dikenal dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam (KSP) harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk menolong para anggota dengan cara meminjamkan sejumlah uang. Pinjaman disertai bunga ringan sehingga tidak memberatkan anggota atau peminjam. Uang yang dipinjamkan dimanfaatkan anggota untuk melakukan kegiatan produktif atau meningkatkan taraf hidup. Koperasi simpan pinjam juga melayani anggota untuk menabung, anggota yang menabung juga akan mendapatkan keuntungan berupa bunga tabungan. Uang hasil tabungan digunakan koperasi untuk menjalankan kegiatan operasional. Kegiatan dalam koperasi meliputi usaha menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.

4. Koperasi jasa

Koperasi jasa melakukan kegiatan usaha berupa layanan simpan pinjam bagi anggota atau non anggota. Keberadaan Koperasi ini

bermanfaat bagi anggota dan non anggota dalam memenuhi kebutuhan layanan non simpan pinjam.

2.2.3 Landasan Koperasi

Menurut (Sari, 2019) Landasan koperasi meliputi Landasan idiil, landasan struktural, landasan operasional, dan landasan mental.

1. Landasan idiil

   Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Pancasila dijadikan dasar dan ditetapkan dalam kehidupan koperasi karena sila-sila dalam Pancasila menjadi sifat dan tujuan koperasi. Landasan idiil harus diamalkan oleh seluruh koperasi karena Pancasila merupakan falsafah negara dan bangsa Indonesia (Revrisond Baswir, 2013)

2. Landasan Struktural

   Landasan struktural adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama, bukan kesejahteraan perorangan. Dengan demikian badan usaha yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) adalah koperasi.

3. Landasan Operasional

Landasan operasional merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus dan pengawas dalam melakukan tugas di koperasi. Landasan operasional terdiri atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

4. Landasan mental

Kesetiakawanan dan kesadaran pribadi merupakan landasan mental. Koperasi merupakan unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi karena koperasi berdasarkan dua landasan mental yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi. Dalam koperasi kedua landasan tersebut merupakan alasan yang saling memotivasi, melengkapi, dan saling mengawasi.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip merupakan asas kebenaran yang menjadi pokok dasar, ideologi, atau panutan dari sebuah badan usaha dalam berpikir dan bertindak. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5, prinsip koperasi di Indonesia terdiri dari tujuh poin sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Bersifat sukarela berarti setiap keanggotaan atau anggota memberikan modal mereka masing-masing secara sukarela untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bersifat terbuka

artinya siapapun bisa menjadi anggota koperasi dengan memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing koperasi.

2. Pengelola bersifat demokrasi

   Pengelolaan koperasi bersifat demokratis adalah seluruh kegiatan operasional koperasi dilaksanakan secara transparan pada semua anggota koperasi. Pembentukan struktur koperasi disesuaikan dengan asas yang menjunjung tinggi demokrasi, baik dalam hal penyelenggaraan rapat, pemilihan pengurus, penentuan pengelola, dan tercermin pula dalam seluruh aktivitas koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)

   Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan sesuai besar anggota karena koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Atas dasar itu maka dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota, koperasi berupaya semaksimal mungkin untuk berlaku adil dan merata salah satunya dalam hal pembagian SHU, karena sisa hasil usaha (SHU) merupakan jasa dan moda dari setiap anggota, maka pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai dan dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam kata lain, pembagian SHU diberikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan kerja masing-masing anggotanya.

4. Pemberian balas jasa yang terdapat pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang warga terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antara sesama anggota koperasi.

5. Kemandirian

Agar koperasi dapat Mandiri maka koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan agar dapat mengangkat kuat koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat titik agar dapat diterima masyarakat koperasi harus memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

6. Pendidikan perkoperasian

Dalam koperasi anggota didik untuk berwirausaha dan mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat titik pendidikan perkoperasian ini dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi anggota Koperasi untuk berwirausaha atau bekerja setelah mereka terjun ke dalam masyarakat. Selain wirausaha, pendidikan koperasi juga dimaksudkan untuk mematangkan anggota berkenaan dengan pemahaman koperasi, keorganisasian koperasi, dan lain-lain.

7. Kerjasama antarkoperasi

Kerjasama antarkoperasi yang dimaksud adalah koperasi yang lebih tinggi tingkatannya harus membimbing koperasi yang baru terbentuk titik Selain itu, adanya kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya dengan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk

mensejahterakan anggota dari setiap koperasi dan dapat memajukan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama.

2.2.5 Tujuan Koperasi

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tujuan koperasi adalah:

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya
2) Murut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera maju dan mandiri dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
3) Menurut Bung Hatta selaku bapak koperasi tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencakup kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi pelaku UMKM di Indonesia.

2.2.6 Modal Pokok Koperasi

Menurut Undang-Undang RI No 25 tahun 1992 pasal 41 ayat (1) modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri yang dimiliki koperasi adalah modal yang menanggung resiko, dikatakan menanggung resiko karena jika koperasi menderita rugi dalam usaha ekonominya, maka modal sendiri koperasi itulah yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Modal sendiri menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 41 ayat (2), meliputi simpanan pokok, simpanan

wajib, dana cadangan, dan dana hibah. Sedangkan untuk modal pinjaman, menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 41 ayat (3) , modal pinjaman dapat berasal dari : Anggota, Koperasi lainnya dan atau anggota, Bank dan atau lembaga keuangan lainnya, Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lainnya yang sah.

2.2.7 Definisi Laporan Keuangan

Menurut (Hery, 2015) laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan, sedangkan dalam standar akuntansi keuangan dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta Laporan Perubahan Modal, dimania Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan Perhitungan (laporan)

Rugi Laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikutsertakan kelompok lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab-sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar lainnya. "Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut". Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka laporan keuangan adalah informasi yang berasal dari sebuah proses akuntansi yang isinya menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu.

2.2.8 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP (IAI, 2013) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi

kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi tiga, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah.

2.2.9 Posisi Keuangan

Pada SAK ETAP dijelaskan bahwa posisi keuangan suatu entitas terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu.Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban, dan ekuitas.

Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan memperoleh entitas.
2. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

2.2.10 Penyajian Laporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan menurut (IAI, 2009) entitas harus mampu menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset,

liabilitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

2.2.11 Laporan Keuangan Koperasi

Menurut (Azhari, 2012) laporan keuangan koperasi terdiri dari:

1. Neraca

   Neraca merupakan posisi keuangan sebuah perusahaan atau koperasi yang merincikan aset, liabilitas dan ekuitas pada periode tertentu, periode tertentu ini bisa bulanan semester atau tahunan, biasanya posisi keuangan disajikan pada akhir tahun sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi.

2. Laporan Laba Rugi/Perhitugan Hasil Usaha

   Laporan laba rugi atau perhitungan sisa hasil usaha pada usaha koperasi, merupakan sebuah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban pada sebuah perusahaan atau koperasi pada periode tertentu.

3. Laporan Ekuitas Pemilik/Laporan Kekayaan Bersih

   Laporan ekuitas pemilik atau kekayaan bersih pada usaha koperasi menunjukkan sebuah perubahan ekuitas selama periode tertentu.

4. Laporan Arus Kas

   Laporan arus kas adalah laporan yang memuat jumlah kas masuk (penerimaan kas) dan kas keluar (pengeluaran kas) selama periode tertentu.

5. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota, manfaat ekonomi ini diperoleh dari unsur manfaat pembelian barang, pemasaran, simpan pinjam melalui koperasi dan pembagian sisa hasil usaha.

Definisi pos-pos dalam laporan keuangan koperasi menurut (Azhari, 2012)

1. Aset

Aset adalah sumber ekonomi dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut di masa yang akan datang. Aset terdiri dari:

a) Aset Lancar

1) Kas
2) Bank
3) Perlengkapan
4) Piutang
5) Persediaan barang
6) Beban dibayar dimuka

b) Aset Tetap

1) Tanah
2) Bangunan
3) Peralatan, furniture, perabotan
4) Kendaraan

2. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang. Hutang merupakan kewajiban yang melekat pada sebuah perusahaan untuk menyerahkan sumber ekonomi kepada pihak lain di masa yang akan datang dengan kata lain harus dibayar dengan tempo yang telah disepakati.

Akun hutang yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1) Hutang usaha
2) Hutang bank
3) Wesel bayar
4) Simpanan sukarela pada koperasi

3. Ekuitas

Ekuitas dalam koperasi merupakan modal yang dimiliki koperasi untuk menjalankan usahanya, Pos-pos ekuitas diantaranya:

1) Simpanan pokok dan simpanan wajib
2) Modal awal koperasi
3) Dana hibah
4) Laba atau SHU koperasi

4. Pendapatan

Pendapatan merupakan peningkatan ekuitas pemilik dikarenakan adanya penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, ini menyebabkan kenaikan aset dan penurunan hutang, seperti:

1) Pendapatan usaha
2) Pendapat jasa

3) Pendapat bunga bank

4) Penjualan

5. Beban

Beban memiliki pengaruh yang yang terbalik terhadap akun pendapatan. Beban merupakan penurunan ekuitas pemilik. Beban timbul karena kegiatan perusahaan untuk memperoleh pendapatan, misalnya:

1) Beban gaji

2) Beban sewa

3) Beban utilitas

4) Beban iklan

5) Beban bunga

6) Beban administrasi

7) Ban lain-lain

2.2.12 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah "entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Dalam beberapa hal SAK ETAP

memberikan kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2011.

2.2.13 Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Laporan keuangan (IAI, 2009) adalah laporan keuangan yang lengkap, terdiri atas:

1. Laporan Posisis Keuangan/Neraca

   Laporan posisi keuangan/ Neraca merupakan daftar yang memuat informasi secara terperinci semua aset, ekuitas dan kewajiban entitas pada waktu tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi entitas serta menghitung tingkat pengembalian aset atas laba bersih.

2. Laporan Laba Rugi

   Laporan laba rugi dalam koperasi biasa disebut laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan yang memuat informasi mengenai penghasilan dan beban pada waktu tertentu. Minimal memuat pos-pos pendapatan, beban (dalam koperasi seperti beban operasional dan non operasional, beban pajak), dan sisa hasil usaha setelah pajak.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan perubaha ekuitas merupakan laporan mengenai perubahan modal suatu entitas selama satu periode. Dari laporan ini dapat diketahui

apakah modal bertambah atau berkurang bila dibandingkan dengan modal pada periode sebelumnya.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat informasi mengenai ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas yang terjadi selama satu periode. Arus kas adalah arus masuk kas (penerimaan kas) dan arus keluar kas (pengeluaran kas) yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas investasi.

5. Catatan Atas Laporan Keungan

Catatan atas laporan keuangan memuat tambahan informsi mengenai gambaran umum mengenai entitas, kebijakan akuntansi yang digunakan serta kebijakan lainnya untuk membantu pengguna laporan keungan dalam memahami laporan keuangan, sehingga lporan keuangan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan untuk pengambilan keputusan.

2.2.14 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAKETAP

1. Penyajian Wajar

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Penyajian wajar adalah penyajian yang jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam konsep dan prinsip pervasif dalam (IAI, 2009).

2. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Suatu entitas jika menggunakan SAK ETAP harus membuat pengakuan secara penuh atau pernyataan bahwa telah mentaati semua persyaratan yang disyaratkan dalam SAK ETAP dalam catatan atas laporan keungannya.

3. Kelangsungan Usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, pihak manajemen harus membuat penilaian sehubungan dengan kemampuan atau keadaan koperasi dalam melanjutkan kelangsungan usahanya, apabila ada ketidak pastian yang material terkait dengan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan keraguan terhadap kemampuan koperasi untuk melanjutkan usahanya, ketidak pastian tersebut harus diungkapkan.

4. Frekuensi Pelaporan

Dalam menyajikan laporan keuangan harus lengkap dan periode pelaporan minimal satu tahun sekali. Jika pelaporan menyajikan periode pelaporan lebih panjang atau pendek, entitas tersebut harus mengungkapkan fakta dan alasan penyajian tersebut.

5. Penyajian Yang Konsisten

Penyajian dan pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan setiap periode tidak boleh berubah-ubah, kecuali

a. Jika terdapat perubahan penyajian dan pengklasifikasian yang membuat penyajian menjadi lebih baik
b. Karena SAK ETAP membuat suatu perubahan

6. Informasi Komparatif

Informasi dari sebuah perusahaan akan dianggap berguna jika dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di periode waktu yang sama atau dari perusahaan yang sama tetapi di periode waktu yang berbeda. Informasi yang dapat dibandingkan juga berguna untuk menganalisa sebuah trend perusahaan dari tahun ke tahun, apakah mengalami penurunan atau peningkatan.

7. Materialitas dan Agregasi

Kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalalahan dalam mencatat (misstatement) dapat juga mempengaruhi penyajian wajar dari laporan keuangan, artinya dianggap material bila mana mempengaruhi keputusan ekonomis pengguna. Materialitas dalam konteks ini tergantung pada besar dan/ sifat kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat yang dipertimbangkan di dalam kondisi sekelilingnya dan disajikan secara terpisah antara material dan tidak material (sesuai dengan pos-pos yang sejenis)

8. Laporan Keuangan Lengkap

Seperti yang dijelaskan pada (IAI, 2009) bahwa laporan keuangan yang lengkap, ialah: Laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibuat agar penelitian yang peneliti lakukan dapat dilakukan secara terarah dan terperici. Untuk memudahkan

dalam memahami kerangka berpikir peneliti, kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa fokus penelitian yaitu penerapan SAK ETAP pada Koperasi Wanita Desa Jogoroto dengan menganalisa kesesuaian penyajian dalam laporan keuangan disesuaikan dengan aturan yang ada pada SAK ETAP.